

KEGAGALAN DEMOKRATISASI DI MESIR PASCA-ARAB SPRING¹

THE FAILURE OF DEMOCRATIZATION IN EGYPT POST ARAB SPRING

Samir

Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, SKSG Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, 10430
E-mail: samir.muhammad17@gmail.com

M. Hamdan Basyar

Pusat Riset Politik- Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
E-mail: hbasyar@gmail.com

Diterima: 2 September 2021; direvisi 10 Oktober 2021; disetujui 27 November 2021

Abstract

The Arab Spring had a domino effect on Egypt's political stability. The political transition that occurred after Hosni Mubarak's resignation from power did not indicate an improving Egyptian democratic climate. The election of Morsi from among civilians to become President democratically did not make the democratic process in Egypt run well. This study aims to analyze the failure of democracy after the Arab Spring and to review the dominance of the military in Egyptian politics. The results of this study indicate that the failure of democracy in Egypt occurred due to the division of the Egyptian political elite which gave birth to polarizing sentiments, the Egyptian economic crisis, and the dominance of the military in Egyptian politics which made it easier for the military to carry out a coup. In this case, the military cannot be separated from its role in national politics because a special order has been formed that strengthens the military domination in Egypt.

Keywords: Arab Spring, democracy, Egypt, military coup, economic crisis

Abstrak

Arab Spring memberikan efek domino terhadap stabilitas perpolitikan Mesir. Transisi politik yang terjadi setelah mundurnya Husni Mubarak dari kekuasaannya, tidak menunjukkan iklim demokrasi Mesir yang membaik. Terpilihnya Mursi dari kalangan warga sipil menjadi presiden secara demokratis, tidak membuat proses demokrasi di Mesir berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan demokrasi setelah *Arab Spring* dan mengulas dominasi militer dalam politik Mesir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan demokrasi di Mesir terjadi akibat perpecahan elite politik Mesir yang melahirkan sentimen polarisasi, krisis ekonomi Mesir, dan dominasi kalangan militer dalam perpolitikan Mesir yang memudahkan militer untuk melakukan kudeta. Dalam hal ini, militer tidak bisa dipisahkan perannya dalam perpolitikan nasional karena telah terbentuk tatanan istimewa yang memperkuat dominasi militer di Mesir.

Kata Kunci : Arab Spring, demokratisasi Mesir, kudeta militer, krisis ekonomi

¹ Semua penulis adalah kontributor utama dalam artikel ini.

Pendahuluan

Arab Spring (Musim Semi Arab atau dalam Bahasa Arab disebut dengan *ats-Tsaurat al-Arabiyyah* - Revolusi Arab) merupakan gelombang gerakan perlawanan oleh rakyat pro-demokrasi yang menuntut perubahan politik di kawasan Timur Tengah (Machmudi, 2021). Gerakan ini merupakan bentuk protes dan tuntutan rakyat dengan harapan akan mampu mengubah tatanan menuju masyarakat dan bangsa yang ideal. Gerakan ini juga diharapkan dapat mengubah kondisi yang terjadi akibat pengekangan kebebasan rakyat oleh kekuasaan otoriter, serta adanya kesenjangan sosial antara penguasa yang hidup penuh kemewahan dan rakyat yang miskin (Sahide, 2015).

Gerakan yang awalnya dilihat sebagai langkah demokratisasi di Timur Tengah ini, pada akhirnya tidak melahirkan era baru negara demokratis yang diharapkan mampu memberi ruang terhadap berbagai partisipasi politik di dunia Arab secara terbuka. Sebagian besar rezim-rezim baru yang terbentuk setelah revolusi Arab ini cenderung kembali ke sifat asalnya, yaitu rezim otoritarian. Kegagalan *Arab Spring* dalam menumbuhkan sistem demokrasi di Timur Tengah merupakan sebuah fenomena penolakan, yakni pada hakikatnya dunia Arab secara politik dan budaya lebih sulit untuk menerima demokrasi.

Kekuasaan yang bersifat otoriter dan praktik politik yang telah mengakar di Timur Tengah tidak serta merta dapat diubah melalui jalur revolusi. Jika negara tersebut memiliki peran kekuatan elite tunggal yang dominan, maka akan terjadi penguasaan terhadap rakyat. Jika tidak, kekuatan politik bersifat lebih merata sehingga aktor-aktor politik cenderung saling menguasai satu sama lain dalam konflik sipil yang berkepanjangan dan berdarah (Wahyudi et al, 2020).

Rentetan Peristiwa Arab Spring di Timur Tengah ini diawali oleh seorang pedagang kaki lima di Tunisia yang dikenal dengan Mohamed Bouazizi yang melakukan protes dengan membakar dirinya. Aksi ini muncul akibat kekesalannya setelah adanya penyitaan barang dagangan, pelecehan, serta penghinaan yang

dilakukan seorang pejabat kota dan ajudannya kepada Bouazizi. Pada 4 Januari 2011 Bouazizi akhirnya meninggal dunia.

Kematian Bouazizi ini memicu demonstrasi besar-besaran yang mampu menjatuhkan rezim Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, pada 14 Januari 2011. Demonstrasi ini merupakan titik awal apa yang disebut dengan Revolusi Melati Tunisia yang kemudian berkembang menjadi *Arab Spring* (Cruz, 2007). Gelombang revolusi ini memberi efek domino terhadap beberapa negara di Timur Tengah, salah satunya ialah Mesir yang menyebabkan jatuhnya rezim Husni Mubarak. Rezim Husni Mubarak yang telah berkuasa cukup lama di Mesir akhirnya tumbang pada Februari 2011. Turunnya Mubarak memberikan udara segar terhadap ruang perpolitikan Mesir untuk berubah (Wahyudi et al, 2020).

Terpilihnya Mursi sebagai presiden kelima, telah menandai era baru politik dan pemerintahan negara Mesir tersebut. Pemilihan presiden Mesir diadakan pada tanggal 16 Juni 2012. Terdapat 13 kandidat presiden hingga akhirnya tersisa dua nama yaitu Muhammad Mursi dan Ahmad Syafiq. Nama Ahmad Syafiq memang selalu menjadi kontroversi di tengah panasnya temperatur pemilu presiden Mesir. Sejak awal dia mencalonkan diri, tidak sedikit orang yang menentang pencalonannya. Pasalnya, dia dicap sebagai bagian dari rezim Husni Mubarak yang merupakan Perdana Menteri terakhir rezim itu. Bahkan ketika undang-undang isolasi politik terhadap mantan rezim Mubarak disahkan pun, ternyata nama Ahmad Syafiq masih dapat bercokol di daftar kandidat presiden (Hidriyah, 2012).

Untuk pertama kalinya Mesir memiliki seorang pemimpin dari kalangan sipil yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan demokratis. Kesuksesan Mursi terpilih menjadi presiden Mesir mengalahkan Ahmad Syafiq, tentunya tidak terlepas dari dukungan Ikhwanul Muslimin. Hal ini merupakan babak baru demokratisasi Mesir setelah pengunduran Presiden Husni Mubarak dari kekuasaannya yang diawali dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang memakan banyak korban jiwa.

Setelah satu tahun kepemimpinannya, Mursi pun dengan cepat kehilangan dukungannya di dalam negeri, sehingga dia berhasil dikudeta oleh pihak Militer Mesir. Rupanya masa depan demokrasi di Mesir kian suram hingga pada akhirnya transisi politik demokrasi Mesir yang sedang dibangun harus mengalami kemunduran. Kudeta merupakan preseden buruk bagi iklim demokrasi yang sedang dibangun.

Oleh karena itu, menarik untuk menelaah kembali kondisi yang terjadi di Mesir yang menunjukkan fenomena seorang pemimpin yang terpilih secara sah dan demokratis, tetapi pada akhirnya dikudeta militer. Dalam konteks tersebut, tulisan ini bermaksud untuk membahas mengapa Mesir gagal melakukan demokratisasi setelah *Arab Spring* dan mengapa militer masih terus mendominasi perpolitikan di Mesir.

Perjalanan Demokrasi Mesir

Mesir meraih kemerdekaan dari pendudukan Inggris pada tahun 1922. Sejak saat itu, mereka menata kehidupan politiknya. Pada tahun 1923, Konstitusi Mesir menerapkan sistem parlementer. Kondisi ini memungkinkan warga sipil memiliki kebebasan yang luas (Dunne & Hamzawy, 2008). Akan tetapi, nampaknya pengaruh kolonialisme Inggris masih membekas pada masalah ekonomi dan sosial Mesir, sehingga Mesir belum sepenuhnya menjadi negara merdeka. Situasi ini menyebabkan kudeta yang dipelopori oleh Perwira Gerakan bebas melawan rezim monarki, Gamel Abdul Nasser pada tahun 1952. Sejak saat itu, Mesir dipimpin oleh para penguasa dengan latar belakang militer (Hassan, 2010). Di bawah kekuasaan Gamal Abdul Nasser, perkembangan demokratisasi kerap kali bergesekan dengan kebijakan Nasser yang membatasi pengembangan elemen dasar demokrasi. Nasser menerapkan sistem politik sosialis yang cenderung menganut aliran kiri dan menghapus pluralisme politik yang berkembang di era monarki sebelumnya. Nasser juga memberlakukan sistem politik satu partai dengan pembubaran parlemen dan melarang keberadaan kelompok oposisi, baik Islamis maupun kelompok kiri. Secara tidak

langsung kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Nasser memperoleh seluruh kekuasaan eksekutif dan menjadikannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Mesir (Selim, 2015). Setelah kematian Nasser, kepemimpinan Mesir digantikan oleh Anwar Sadat. Dalam kepemimpinannya, Anwar Sadat mengubah kebijakan politik, ekonomi, dan luar negeri Mesir ke arah liberal yang tentunya berlawanan dengan kepemimpinan sebelumnya.

Salah satu kebijakan liberalisasi Anwar Sadat ialah *Infitah* (pintu terbuka) yang dicanangkan untuk meningkatkan investasi asing. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Sadat, liberalisasi ekonomi erat kaitannya dengan pergeseran politik luar negeri Mesir, dari Uni Soviet ke Amerika Serikat. Akibat pergeseran kebijakan luar negeri Mesir dari Timur ke Barat memaksa Mesir untuk mempertimbangkan kembali keterbukaannya terhadap demokratisasi karena Amerika sendiri menganut agenda demokrasi. Untuk meningkatkan liberalisasi politik, Sadat berupaya memperkenalkan sistem multi partai. Hal itu ditandai dengan terbitnya UU 40/1977 yang menjadi landasan didirikannya lima partai politik: Partai Sosial Liberal (*Hizb Al-Ahrar AL-Isytirakiyyin*) berdiri mewakili ideologi kanan, Partai Uni Nasional Progresif (*Hizb AL-Tajammu Al-Wathani Al-Thaqaddumi Al-Wahdawi*) mewakili aliran kiri, Partai Buruh (*Hizb Amal*), Partai Wafd Baru (*Hizb Al-Wafd AL-jadid*) dan Partai Sosialis Mesir (*Hizb AL-Misr*) yang mewakili paham sentris.

Dalam perpolitikannya, Sadat terus melakukan upaya mempertahankan kekuasaannya. Dia membentuk partai baru yang bernama Partai Nasional Demokratik (*Hizb Al-Wathani Al-Dimuqrati- NDP*) untuk memperkuat kepemimpinannya (Alfian & Syamsudin, 1988). Pemerintahan Sadat rupanya tidak jauh berbeda dari Nasser yang merupakan pendahulunya. Melalui kebijakannya, Sadat memutuskan untuk mengurangi peran oposisi, partai individu, dan media dengan mengeluarkan sejumlah dekrit pembatasan dan represi (Selim, 2015). Alasan pergeseran politik ini merupakan langkah yang melatarbelakangi awal kepemimpinan Sadat di Mesir. Pada

awalnya Sadat membutuhkan legitimasi politik dalam negeri untuk mengatasi setiap masalah dalam negerinya terkait ketidakstabilan politik, sehingga dia merubah citranya dari seorang yang otoriter menjadi pemimpin yang demokratis, meskipun ia menyadari bahwa hal tersebut merupakan tantangan sulit baginya. Bahkan, ia harus mengatasi masalah serius yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan keamanan Mesir yang mengalami penurunan. Kondisi tersebut menyebabkan Anwar Sadat berperilaku serupa dengan Nasser, yakni kembali sebagai pemimpin yang otoriter. Kondisi domestik Mesir semakin parah ketika diputuskan sebuah kebijakan pengurangan subsidi yang memicu demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan di kota-kota Mesir pada tahun 1977. Protes massal tersebut memakan 79 korban jiwa, 1.000 luka-luka dan 1.250 orang dipenjara (Yumitro & Estriani, 2017).

Pada 6 Oktober 1981 dalam suatu parade militer di Kairo, Sadat terbunuh oleh simpatisan *Al-Jihad* yang berhasil menyusup ke dalam Angkatan Militer Mesir. *Al-Jihad* ini merupakan kelompok radikal dan fundamentalis yang memiliki luka dan dendam mendalam terhadap langkah politik yang dilakukan Anwar Sadat. Ada ribuan aktivis, baik dari kalangan partai politik, maupun organisasi keagamaan yang dipenjara oleh Sadat. Mereka protes dan menolak perjanjian *Camp David* antara Israel dengan Mesir pada tahun 1979. Tarek Al-Zumur dan pelaku utama pembunuhan, Khaled Islambuli merupakan anggota kelompok *Al-Jihad* yang mendalangi pembunuhan Anwar Sadat ketika sedang melakukan parade militer pada tahun 1981. Sadat terbunuh dengan cara yang sebelumnya belum pernah terjadi. Peristiwa tragis ini menggemparkan Mesir. Bahkan, seluruh dunia tersentak akan aksi berdarah tersebut (Kahana & Stivi-Kerbis, 2014).

Setelah terbunuhnya Sadat oleh simpatisan *Al-Jihad*, estafet kursi kepemimpinan Mesir pindah ke tangan Husni Mubarak. Dia menerapkan kebijakan yang berorientasi pemulihan stabilitas. Dengan cara ini, Husni Mubarak membebaskan tahanan politik dan menyerukan rekonsiliasi nasional di antara

lawan politik. Dia juga memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pers, mengizinkan pendirian partai politik (Selim, 2015).

Pada masa kepemimpinan Mubarak, dibentuk sebuah Dewan Agung Militer (*Supreme Council of The Armed Forces-SCAF*). Militer memiliki kedudukan khusus dalam pemerintahannya. Partai Nasional Demokrat (NDP) menjadi partai penguasa di bawah kepemimpinan Mubarak. Dalam kiprahnya, NDP tidak terlepas dari peran militer yang mendukung penuh setiap kebijakan Mubarak. Selain militer, unsur lain yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan Mesir adalah kelompok sekuler-liberal. Kelompok ini memiliki basis kalangan menengah atas dan terpelajar. Beberapa tokoh dalam kelompok ini memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan.

Namun, meski terdapat beberapa elemen demokrasi elektoral yang ditemukan dalam kepemimpinannya, terdapat beberapa faktor yang justru menghambat transisi demokrasi selama pemerintahannya, seperti lemahnya partai oposisi dan masyarakat sipil, sulitnya menyelesaikan transisi damai, korupsi yang merajalela, kebijakan deliberalisasi, dan ancaman balasan.

Penggambaran demokrasi elektoral Mubarak merupakan tampilan dari otoritarianisme di era demokratisasi. Dalam artian, di tengah tuntutan rakyat serta tekanan internasional yang sangat besar agar negara ini semakin dekat dengan demokrasi, rezim otoriter di Mesir menggunakan sistem pemilu sebagai tameng dalam sistem negara yang mengedepankan proses konsolidasi demokrasi, meskipun kenyataannya sangat berbeda. Dalam kasus ini, partai yang berkuasa yakni NDP mempertahankan hegemoninya di sebagian besar pemilihan parlemen Mesir. Dengan demikian, strategi NDP dan Mubarak tidak terlepas dari represi, patronase, dan kontrol media oleh rezim Mubarak (Yumitro & Estriani, 2017).

Ketika Mubarak dilengserkan dari kursi kepresidenan Mesir, kekuasaan politik diserahkan kepada *Supreme Council of the Armed Forces* (SCAF). Dengan penyerahan ini,

SCAF memiliki peran utama dalam perpolitikan Mesir pada masa transisi. Perpindahan kekuasaan eksekutif ke tangan elite militer atau SCAF, menimbulkan keraguan dari pihak demonstran atas komitmen SCAF terhadap demokrasi. Unjuk rasa kian memanas, menuntut SCAF untuk tidak terlibat dalam perpolitikan Mesir dan segera menyelenggarakan pemilu (KomNasKDM, 2014). Untuk memperkuat posisinya, SCAF membuat amandemen terbatas pada Konstitusi Mesir, 30 Maret 2011. Mengingat pentingnya demokratisasi di Mesir, masyarakat nasional maupun internasional, mendesak SCAF untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Mesir sendiri dalam menyelesaikan permasalahan kepemimpinan politik mereka. Dengan desakan itu, diadakanlah pemilihan umum (pemilu) untuk anggota parlemen. Setelah terpilih perwakilan rakyat di parlemen, kemudian diadakan pemilihan umum Presiden Mesir.

Dinamika Politik Mesir di bawah Pemerintahan Presiden Mursi

Setelah kepemimpinan Mubarak, Mesir memulai demokratisasi melalui pemilihan umum (pemilu) parlemen. Pemilu parlemen tersebut diselenggarakan dalam tiga tahap, yaitu pada tanggal 28 November 2011, 14 Desember 2011, dan 3 Januari 2012 (sekitar enam pekan). Pada pemilu tersebut, pemenangnya adalah Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Party* - FJP) yang berafiliasi pada gerakan Ikhwanul Muslimin (IM). Akan tetapi, parlemen hasil pemilu itu dibubarkan oleh SCAF, 16 Juni 2012. Pembubaran parlemen dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi Agung (*Al Mahkama Al Dustūrīya El 'Ulyā - Supreme Constitutional Court* - SCC) pada tanggal 14 Juni 2012 menyatakan bahwa pemilu anggota parlemen tersebut melanggar undang-undang dasar.

Kemudian, pada pemilu presiden Mesir tahun 2012, Mohammad Mursi dapat mengalahkan kandidat lain, yaitu Ahmad Shafiq. Pada mulanya, kemenangan Mursi ini dianggap akan memberi titik terang bagi rakyat Mesir untuk mendorong keberhasilan transisi

demokrasi pertama setelah *Arab Spring* 2011.

Akan tetapi, tampaknya Mesir harus mengalami dinamika politik yang lebih rumit. Demokratisasi yang diharapkan dapat berkembang, setelah lengsernya Husni Mubarak, tampaknya tidak sepenuhnya terealisasi. Presiden Mursi harus menghadapi berbagai masalah ekonomi, politik, dan sosial yang merupakan peninggalan rezim Mubarak. Tidak hanya sebatas tuntutan rakyat yang harus dihadapinya, tetapi ia juga harus berhadapan dengan sistem yang masih bercokol di birokrasi negara oleh pendahulunya, yakni rezim Mubarak yang telah mengakar kuat di ranah politik, ekonomi, dan sosial Mesir yang dikenal dengan sistem "*deep state*" atau dalam bahasa Arab disebut (*Daulat al-Umqi*). *Deep State* merupakan sebuah sistem kekuasaan yang dijalankan dan diawasi oleh sekelompok utama yang terdiri dari empat unsur: militer, tokoh berpengaruh, pemilik modal, ditambah dengan media massa. Secara umum *deep state* dipahami sebagai sistem yang cenderung memiliki karakter totaliter, tidak menerima adanya kelompok oposisi (Mushlih & Hurriyah, 2016; Kartini, 2015).

Pergulatan kepemimpinan politik Mesir tidak kunjung reda. Panggung perpolitikan Mesir diperburuk dengan fragmentasi antara kelompok-kelompok revolusioner yang memiliki *background* sekuler dengan kelompok Islam. Sejak awal ketika Mursi berkuasa, polarisasi politik di kalangan elit Mesir bermunculan dan menjadi salah satu tantangan utama bagi kebijakan Mursi.

Awal dilantikannya Mursi pada 30 Juni 2012 sebagai presiden, langkah pertama yang ia lakukan adalah mengeluarkan dekret untuk menghidupkan kembali posisi parlemen (*Majlis As-Sha'ab*) yang dianggap inkonstitusional oleh *Supreme Constitutional Court* (SCC) pada 14 Juni 2012, SCC merupakan Mahkamah Agung Konstitusional Mesir dan kemudian dibubarkan oleh SCAF pada 16 Juni 2012. Langkah tersebut dilakukan Mursi agar anggota parlemen dapat kembali melakukan sidang. Selain itu, Mursi juga melalui Dekret Presidennya menyatakan bahwa akan mengadakan pemilihan umum dalam waktu 60 hari setelah pembuatan

konstitusi baru diselesaikan oleh Dewan Konstituante yang beranggotakan 100 orang. Tugas Dewan Konstituante adalah merancang konstitusi baru dalam jangka waktu 6 bulan. Namun, langkah tersebut ditolak dan dianggap tidak sah oleh SCC. Mahkamah Konstitusi Mesir menyatakan bahwa tidak ada banding terkait keputusan pembubaran anggota parlemen. Mursi diperingatkan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi Mesir bahwa langkah yang diambilnya tidak sah dan jika meneruskan kebijakannya maka dianggap sebuah tindakan pelanggaran hukum. Dalam merespon dekret ini, SCAF mengadakan pertemuan darurat yang keterangannya hasil pertemuannya tidak dibagikan ke publik (BBC, 2012). Kemudian Mursi melalui wewenangnya mengeluarkan dekret yang berisi empat pasal, bertujuan untuk meredakan kekuasaan kalangan militer. Berbagai upaya nampaknya dijalankan Mursi untuk mengontrol kalangan militer dalam kekuasaannya, dimulai dari pembatalan kekuasaan legislatif yang berada di tangan SCAF, hingga mengganti Kepala SCAF, Jenderal Thontowi pada tanggal 12 Agustus 2012 (Wahyudi et al, 2020).

Upaya tersebut tidak menjadikan kedudukan dan kekuasaan Mursi aman dari berbagai ancaman. Kondisi perumusan konstitusi yang tidak menemui titik temu ini direspons oleh Mursi dengan Dekret Presiden pada tanggal 22 November 2012. Dekret tersebut cenderung memberikan kekuasaan tanpa batas terhadap kekuasaan Mursi di Mesir. Alasan Mursi mengeluarkan dekret tersebut ialah untuk mengantisipasi upaya Dewan Konstituante yang sedang menyusun konstitusi baru karena lembaga tersebut kemungkinan besar dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi atau SCC dan anggotanya dapat diklaim sebagai inkonstitusional (Kirkpatrick & Sheikh, 2012). Dekret tersebut memicu protes rakyat, termasuk kelompok liberal yang sebelumnya memilih diam kembali ikut bersuara secara lantang. Tempat historis revolusioner, yakni lapangan Tahrir kembali digunakan sebagai tempat unjuk rasa. Para unjuk rasa menuntut Mursi untuk mencabut dekret yang dianggap otoriter.

Di tengah ketegangan tersebut, Dewan Konstituante yang secara umum didominasi

oleh kelompok Islam telah selesai menyiapkan draft konstitusi yang kemudian siap untuk direferendum. Namun, gabungan oposisi Mursi yang disebut dengan *National Salvation Front* (NSF) merespons hal ini dengan melakukan kampanye penolakan untuk memilih ‘tidak’ dalam referendum konstitusi. *NSF* merupakan gabungan kekuatan kelompok sekuler yang merasa dikhianati oleh militer dan Ikhwanul Muslimin (IM), yang kemudian menjadi oposisi politik utama Mursi di Mesir. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap hasil referendum, karena draft konstitusi baru berhasil disepakati dan ditandatangani oleh Presiden Mursi pada 26 Desember 2012 (Ramly & Irenewaty, 2015; Brown, 2013).

Upaya Mursi untuk referendum tampaknya tidak mengurangi intensitas aksi para pendemo. Dalam hal ini Mursi mengeluarkan dekret yang berisi pencabutan dekret sebelumnya. *NSF* merasa bahwa rancangan konstitusi baru hanya menguntungkan kelompok-kelompok partai Islam yang didominasi oleh IM (Stein, 2012). Meskipun dekret dinyatakan dicabut, aksi protes terus berlanjut. Sejak itu, perpecahan dan polarisasi rakyat Mesir semakin parah. Hal ini kian merusak proses transisi demokrasi di Mesir.

Momentum peringatan satu tahun kekuasaan Presiden Mursi pada tahun 2013 dijadikan sebagai celah bagi kaum oposisi untuk terus berusaha mengacaukan kekuasaan Presiden Mursi dan melakukan perlawanan terhadap penguasa. Kondisi yang semakin kacau menyebabkan lahirnya sebuah gerakan protes terhadap pemerintah dan meminta Mursi untuk turun dari jabatannya sebagai presiden dengan menggulirkan petisi untuk menggulingkan Mursi. Gerakan ini disebut *Tamarod* (pembangkangan).

Lapangan Tahrir kembali memanas dan dijadikan panggung demonstrasi dari kedua kubu baik dari kubu anti penguasa dengan kubu pro-penguasa. Kedua kubu saling menyuarakan secara lantang bahwa posisi mereka adalah benar serta mewakili keseluruhan masyarakat Mesir. Kondisi ini dijadikan sebagai momentum bagi kalangan elite militer untuk kembali masuk ke

dunia politik Mesir. Dengan kondisi Mesir yang semakin rusuh ditambah anggapan kalangan militer bahwa Mursi tidak sanggup mengatasi gejolak pemerintahan, maka pada 1 Juli 2013, militer mengeluarkan ultimatum kepada Mursi untuk segera menyelesaikan masalah politik di Mesir dalam kurun waktu 48 jam. Dengan cara ini, militer mengancam akan melakukan intervensi apabila Mursi tidak memenuhi tuntutan. Berdasarkan hal ini, Mursi yang merasa dipilih sebagai presiden yang sah dan demokratis tentu menolak keras ultimatum tersebut. Akhirnya, militer melancarkan ultimatumnya dengan mengambil alih kekuasaan Mursi pada 3 Juli 2013 malam. Kudeta militer ini berhasil mengakhiri kekuasaan Presiden Mursi yang dipilih secara demokratis dan berujung menjadikan Mursi dan aparatnya menjadi tahanan militer (Basyar, 2015).

Setelah militer berkuasa kembali dalam perpolitikan Mesir, keterlibatan masyarakat dalam pemilu secara keseluruhan diatur sesuai dengan kepentingan militer. Konstitusi Mesir yang disahkan pada tahun 2014 sangat menguntungkan kelompok militer, karena merekalah yang memiliki kekuasaan tertinggi setelah tergulingnya Mursi dari kursi pemerintahan.

Pada pemilu tahun 2014 Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Mesir yang dikenal dengan Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi ini berhasil memenangkan pemilihan presiden secara mutlak. Kemudian, pemerintah Mesir menetapkan organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai organisasi terlarang. Al-Sisi berhasil memperoleh suara terbanyak semenjak pencalonan, sebab dia dipandang sebagai sosok yang mampu mengatasi stabilitas politik di Mesir. Terpilihnya Al-Sisi menjadi presiden menandai kalangan militer kembali mendominasi di dunia politik Mesir. Al-Sisi semakin mancapkan tongkat kekuasaannya setelah kembali memenangi pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2018. Dengan demikian Al-Sisi memperoleh legitimasi kuat bagi kekuasaannya (Economist, 2018).

Faktor-faktor yang mendorong kegagalan Mesir melakukan demokrasi pasca-*Arab Spring*

Demokratisasi membutuhkan perjuangan dari semua elemen bangsa. Ada yang berhasil menjadi negara demokratis. Namun, ada juga negara yang mengalami kegagalan dalam berdemokrasi. Kegagalan dalam upaya mewujudkan proses demokratisasi di Mesir pasca-*Arab Spring* tidak hanya sebatas dilihat dari peran militer yang sangat kuat dan dominan dalam perpolitikan dalam negeri Mesir. Namun, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong kegagalan Mesir dalam mewujudkan demokrasi pasca-*Arab Spring*.

Fragmentasi Kelompok Elite Politik

Kegagalan demokrasi yang terjadi di Mesir dilatarbelakangi oleh perpecahan elite politik di masa transisi Presiden Mursi. Hal ini terlihat dari gagalnya kesepakatan antar-elite politik terkait pembagian kekuasaan di Mesir, serta drama perpolitikan yang terus berlanjut. Perpecahan yang dimaksud adalah tidak ada kesepakatan dan kesepakatan yang sah antara kelompok Islam dengan kelompok liberal-sekuler untuk mempertahankan pemerintahan Presiden Mursi dari kalangan warga sipil yang terpilih secara demokratis. Keduanya memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam dinamika perpolitikan Mesir. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya perpecahan di Mesir yang membuat kondisi negara menjadi tidak stabil.

Mesir merupakan tempat berkembangnya berbagai gerakan dan organisasi Islam. Hal ini merujuk kepada negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kiprah kelompok gerakan Islam mulai terlihat setelah tumbang rezim Husni Mubarak yang mulai berperan dalam kancah politik praktis. Kelompok Islam yang dimaksud adalah Ikhwanul Muslimin, yang mendirikan Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Party* - FJP) dan berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu parlemen. Adapun kelompok Islam lainnya yang dikenal dengan kelompok Salafi berhasil

mendirikan partai *An-Nur* dan institusi Al-Azhar yang hingga kini memiliki peran sentral dalam hubungan agama dan negara (Ghafur, 2014).

Kekuatan Islam muncul semenjak pemerintahan Anwar Sadat. Nilai-nilai Islamisme tidak terbatas hanya pada sosial-politik saja, tetapi telah masuk dalam ranah aparatur negara. Baik Sadat maupun Husni Mubarak kerap kali menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Perkembangan kekuatan politik Islam ini membuat sebagian besar kelompok liberal sekuler khawatir atas kebangkitan Islam yang dijadikan sebagai ancaman atas dasar-dasar kebebasan dan kewarganegaraan yang tertera dalam konstitusi Mesir. Dominasi kelompok kekuatan politik Islam ini dianggap sebagai kerawanan bagi keberlangsungan demokrasi Mesir. Akibatnya, dinamika perpolitikan Mesir kerap kali diwarnai dengan persaingan terbuka dan perebutan pengaruh antara kalangan Islam dengan liberal-sekuler yang semakin menguncup dalam dekade terakhir ini.

Perpecahan elite politik Mesir yang tak dapat diselesaikan ini disebabkan oleh gagalnya sebuah koalisi penghalau kekuatan rezim Mubarak yang bersepakat mencegah kemenangan Ahmed Shafiq. Momen ini tidak dimanfaatkan oleh Mursi sebagai presiden terpilih Mesir dengan baik. Penolakan Mursi terhadap koalisi tersebut disebabkan oleh perbedaan ideologis dalam perumusan sebuah konstitusi Mesir. Selain itu, perpecahan muncul karena dominasi kelompok IM dalam Dewan Konstituante yang memiliki prinsip menolak nilai-nilai Barat dan sekularisme. Sementara kelompok Salafi dalam keterlibatannya memiliki kepentingan untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam sebagai hukum dalam bernegara. Sikap kedua kelompok tersebut berdampak signifikan pada proses perumusan konstitusi yang menjadi sulit. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya komitmen elite politik tersebut untuk melakukan konsolidasi serta koalisi yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai demokrasi yang akan dicapai (Wangke, 2014).

Dalam konteks demokrasi Mesir, polarisasi yang terjadi antara kelompok

Islam dan kelompok liberal-sekuler membuat stabilitas politik dalam negeri Mesir bergejolak. Perselisihan ini semakin memburuk disusul dengan sikap kelompok sekuler yang menjadi anti penguasa (Mursi). Alhasil, koalisi yang telah dibentuk pun terpecah belah dan menjadi lemah. Dengan demikian, perselisihan ini merupakan faktor penentu dalam kegagalan demokrasi Mesir. Dalam hal ini perselisihan dua kelompok tersebut, tentunya tidak terlepas dari pengaruh peran SCAF sebagai pihak yang memegang kendali di masa transisi. Semestinya, hal tersebut dapat dihilangkan apabila kelompok elite politik yang mencuat setelah pemilu mampu bersatu untuk menciptakan kestabilan politik. Ada semacam *power sharing* yang mengakomodir berbagai kepentingan politik di sana. Dengan demikian, militer tidak akan memiliki celah untuk merebut kekuasaan dari rezim sipil yang berhasil dan memiliki legitimasi yang kuat. Mereka cenderung mampu melakukan intervensi dalam ranah politik ketika kelemahan dan perpecahan terjadi pada kalangan politik sipil dan partai politik (Diamond & Marc, 2001). Hal ini mencerminkan perilaku elite politik yang tidak tunduk pada demokrasi. Dengan demikian, maka terjadi sebuah kemunduran demokrasi yang sedang berlangsung di Mesir.

Krisis Ekonomi

Keadaan ekonomi yang stabil dan sejahtera merupakan kriteria pencapaian yang sangat utama dalam suatu pemerintahan. Pemerintah dianggap sebagai aktor yang paling bertanggung jawab atas kemajuan dan berkembangnya ekonomi secara pesat. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan motif militer yang akan melaksanakan kudeta apabila laju ekonomi cenderung rendah, kemudian akan mengakibatkan kegaduhan dan unjuk rasa pada masyarakat yang berpengaruh pada stabilitas negara secara signifikan. Kemunduran ekonomi yang disebabkan oleh pemerintah akan menimbulkan kegeraman dan memperkuat anggapan militer dapat mengambil peran sebagai penentu kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Di masa pemerintahan Mursi, Mesir mengalami kesenjangan sosial yang cukup tajam. Kesenjangan ini terjadi akibat dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang sangat cepat. Kondisi ekonomi Mesir telah memburuk sejak di bawah kepemimpinan Husni Mubarak. Setelah lengsernya Husni Mubarak yang kemudian digantikan dengan Mursi, harus berhadapan dengan krisis keuangan negara. Krisis keuangan tersebut merupakan dampak dari penyusutan sektor wisata akibat ketidakstabilan politik. Kondisi ekonomi diperburuk dengan kurangnya minat investor terhadap Mesir dan harga pangan yang melambung tinggi. Kelompok militer di Mesir memiliki fungsi rangkap menjaga stabilitas politik negara. Setiap kali ada perubahan pemimpin baru, kelompok militer memiliki kesempatan untuk merebut kekuasaan, karena hampir 5-40% sektor perekonomian di Mesir dikelola dan dikuasai oleh militer.

Alun-alun Tahrir menjadi tempat bagi rakyat untuk menuntut soal kesejahteraan ekonominya. Sejak tahun 2010, tercatat bahwa angka pengangguran di Mesir mengalami kenaikan, dari 9% menjadi 12,7% pada tahun 2011. Berdasarkan persentase klasifikasi pengangguran yang terjadi di Mesir, sebanyak 80% dari jumlah pengangguran berasal dari kalangan remaja. Indeks penilaian ekonomi Mesir kian memburuk. Prediksi Lembaga Keuangan Internasional (International Monetary Fund, IMF) yang menyatakan ekonomi Mesir tumbuh sekitar 2% pada tahun 2013 merupakan fase pertumbuhan ekonomi paling lambat semenjak 1992. Akibat besarnya utang luar negeri, Mesir mengalami inflasi yang tinggi dan termasuk pertumbuhan dengan ekonomi paling lambat di antara negara-negara di Timur Tengah (Sahasrad, 2014). Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat berdampak pada tingkat pengangguran dan kemiskinan di Mesir.

Berdasarkan data di atas, stabilitas politik negara akan bergantung pada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan faktor penentu dalam keberlangsungan demokrasi di Mesir. Tuntutan rakyat terhadap kesejahteraan kepada Presiden Mursi memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai tempat. Mursi dianggap gagal

dalam membangun stabilitas perekonomian dan kesejahteraan rakyat Mesir. Kegagalan tersebut dijadikan senjata oleh kalangan oposisi Mursi untuk menentang pemerintahannya, bahkan melengserkan kekuasaannya melalui kudeta militer. Hal terpenting dari revolusi setelah lengsernya Husni Mubarak ialah pemulihan ekonomi dan peningkatan proses demokrasi di Mesir. Namun, pada realitanya karakter pemerintahan Mursi tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, rezim Mubarak.

Kudeta Militer

Dalam negara demokratis, militer tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Kualitas demokrasi menjadi turun, bila peran aktif militer semakin menguat dalam peran sipil (Nordinger, 1990). Potret perpolitikan Mesir di bawah pemerintahan Mursi mengalami kekacauan dengan merambahnya protes-protes rakyat terhadap Dekret Presiden 22 November 2012 di beberapa daerah. Kondisi itu membuat pemerintahan semakin buruk dan memicu militer untuk mengambil langkah dalam mengamankan negara. Ini merupakan titik awal yang dimanfaatkan militer untuk melakukan intervensi politik di tengah kekisruhan.

Dari segala runtutan kegagalan pemerintahan Mursi untuk mengatasi kekisruhan, nampaknya kalangan militer menganggap Mursi tidak mampu membendung dan mengatasi kekacauan tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 2013 tepat pada pukul 16.30 waktu Mesir, militer memberi ultimatum pada Presiden Mursi untuk menuntaskan masalah politik Mesir dalam waktu 48 jam. Mursi menolak tuntutan militer, sebab ia merasa memiliki legitimasi kekuasaan yang dipilih oleh rakyat secara sah dan demokratis. Akibat penolakan tuntutan militer oleh Mursi, maka militer melancarkan intervensinya untuk menggulingkan kekuasaan Mursi. Kudeta tersebut dilandasi dengan *roadmap* masa depan Mesir yang dibahas pada pertemuan antara Al-Sisi dengan tokoh-tokoh politik oposisi Mursi.

Kudeta yang mengakhiri kekuasaan Mursi menandai gagalnya demokrasi Mesir. Pasalnya, Mursi merupakan presiden terpilih pertama

pada masa transisi, dan pemerintahan Mursi pada awalnya muncul sebagai harapan baru demokrasi bagi Mesir. Akan tetapi, situasi politik Mesir di bawah pemerintahan Mursi ternyata tidak kunjung membaik. Apabila merujuk pada konstitusi yang berlaku saat itu, kalangan militer tidak memiliki wewenang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis Mesir. Tugas mereka adalah sebagai komponen utama negara yang menjaga stabilitas dan keamanan negara, bahkan posisi panglima tertinggi mereka berada di bawah presiden.

Dalam bentuk apapun, kudeta dinisbatkan sebagai bentuk pengingkaran dari proses demokratisasi yang sedang tumbuh di kedaulatan Mesir setelah Revolusi 11 Februari 2011. Militer telah merenggut seluruh nilai-nilai dan proses demokrasi di Mesir. Rakyat Mesir harus menelan pahitnya kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan kebebasan melalui demokrasi yang sehat. Masyarakat Mesir harus kembali membangun proses-proses demokrasi dari dasar.

Seharusnya di setiap negara yang menganut sistem demokrasi, semua kalangan harus menjadi jagapati atas terselenggaranya demokratisasi. Lemahnya kekuasaan eksekutif serta keselarasan kepentingan militer untuk kepentingan pribadinya, pemerintahan akan berubah menjadi rezim militer karena perwira militer sendiri yang merampas kekuasaan dari rezim sebelumnya. Kudeta ini menyebabkan Mesir masuk dalam pusaran konflik perang saudara, dan meningkatnya aksi terorisme secara masif (Wahyudi et al, 2020).

Hal ini menunjukkan lunturnya demokrasi di Mesir dengan nuansa parlemen yang tidak demokratis, pemerintah dan presiden hanya sebatas representasi badan eksekutif semata, bukan lagi sebagai pilar utama dalam sistem politik yang fungsional.

Dominasi Militer dalam Politik Mesir

Kalangan militer selalu memiliki peranan aktif dalam sejarah perpolitikan Mesir. Bahkan perkembangan demokratisasi Mesir tidak

terlepas dari pengaruh besar militer sejak runtuhnya sistem monarki pada tahun 1952. Keterlibatan militer di Mesir diawali dengan tergabungnya para petinggi militer dalam sebuah organisasi penggulingan rezim Raja Farouk tahun 1952, yang dikenal dengan Organisasi Perwira Bebas (*Free Officer*). Peristiwa tersebut merupakan titik krusial Mesir didominasi oleh kekuatan militer dan presiden yang memiliki latar belakang militer yang melekat hingga jatuhnya rezim Mubarak pada tahun 2011 (Dam, 2001).

Di era pemerintahan Nasser, Mesir digambarkan sebagai masyarakat militer, karena mudahnya keterlibatan militer dalam administrasi Nasser. Di luar itu, Nasser banyak melibatkan militer di berbagai negara dengan proyek ekonomi raksasa. Dalam kepemimpinannya, Nasser membentuk sebuah partai yang sebagian besar didominasi kalangan militer, partai ini disebut Partai Kemerdekaan yang memiliki tujuan untuk menyebarkan propaganda dan ideologi tentara pada masyarakat untuk memperoleh legitimasi dari warga sipil. Masyarakat Mesir digiring untuk tunduk dan mendukung kepemimpinan Nasser, jika tidak, maka mereka akan memperoleh tindakan politik dari penguasa militer Mesir.

Berbeda pada masa pemerintahan Sadat, meskipun depolitisasi militer dilakukan oleh Sadat dalam kebijakannya, tetapi militer masih memiliki hak istimewa dan memberi kekuasaan untuk mengembangkan ekonomi-militer sebagai bentuk timbal balik atas dukungan rezimnya. Diperkirakan militer telah sukses mengendalikan sekitar 40% dari total ekonomi Mesir yang berasal dari perusahaan bisnis, terlebih bantuan dana sebesar \$1,3 miliar dari militer AS setiap tahunnya sejak Sadat menandatangani perjanjian *Camp David* pada 1979 (Pappalarado, 2011). Di masa rezim Mubarak, kedudukan militer semakin kuat di Mesir. Militer diberikan banyak hak istimewa, tidak hanya sebatas dalam bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi. Sejak saat itulah militer secara terbuka membangun kekuasaannya yang dikenal dengan perumpamaan “negara di atas negara”, yang berdampak signifikan pada struktur ekonomi dan sosial di Mesir (Kunahyono, 2013).

Di tengah polarisasi serta perpecahan yang mendalam di masa pemerintahan Mursi, militer memanfaatkan momentum untuk kembali bermain dalam perpolitikan Mesir. Di tengah protes massa yang menuntut pengunduran Mursi dari kursi pemerintahannya, di langit kota Mesir nampaknya terlihat sebuah pesawat militer terbang di atas kerumunan massa dan menjatuhkan bendera Mesir sebagai tanda bahwa militer memihak rakyat Mesir. Hingga pada akhirnya Mursi berhasil digulingkan dari kursi kekuasaannya setelah rangkaian skenario yang dibangun oleh militer.

Militer kemudian menunjuk Adly Mansour, kepala Mahkamah Konstitusi tertinggi Mesir sebagai presiden sementara sampai disusun suatu konstitusi baru dan terlaksana pemilihan umum. Mansour kemudian membentuk sebuah kabinet yang sebagian besar terdiri dari pendukung rezim Mubarak dan pensiunan Jenderal Militer. Penunjukan tersebut berdasarkan peta jalan politik yang dirancang oleh militer untuk memperkuat kedudukannya. Setelah militer kembali menguasai politik Mesir, seluruh partisipasi masyarakat dalam pemilu diatur sesuai dengan kepentingan militer. Hal itu dapat dipahami bahwa mereka berhasil memenangkan perpolitikan di Mesir dengan mengambil alih kekuasaan Presiden Mursi.

Adly Mansour menyelenggarakan pemilu presiden pada tahun 2014. Pemilu tersebut dimenangkan oleh tokoh militer pelaku kudeta pada mantan Presiden Mursi, yaitu Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi. Dengan demikian, prospek demokrasi Mesir dipertanyakan. Artinya, Mesir masih berada di bawah bayang-bayang elite penguasa lama yang didominasi oleh militer. Bayangan rezim lama inilah yang menyebabkan cacatnya proses demokratisasi di Mesir pasca-*Arab Spring*. Dalam hal ini, militer dan elite penguasa lama masih mempertahankan posisinya di hati rakyat Mesir. Ini bukan hanya karena militer memiliki sejarah panjang dalam melindungi negara, tetapi demonstran anti-Mursi berupaya untuk tidak menjadikan seorang pemimpin Mesir yang Islamis. Mereka juga khawatir dengan gerakan IM yang dianggap akan mengubah sistem negara menjadi Islamis seperti halnya revolusi Iran tahun 1979 (Al-Amin, 2013; Yumitro & Estriani, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa militer Mesir memiliki koneksi yang kuat dan mendalam dalam bidang politik dan ekonomi, terlebih memiliki hubungan erat dengan aktor eksternal bersama dengan elite penguasa Mesir. Oleh karena itu, kegagalan demokrasi terjadi pada Mesir akibat peran militer secara mendalam pada politik praktis di Mesir.

Demokrasi hanya sebatas tameng dalam praktiknya. Al-Sisi mengklaim bahwa Mesir merupakan negara demokrasi, tetapi dalam praktiknya, untuk mempertahankan kekuasaannya, Al-Sisi tidak pernah menunjuk warga sipil tanpa latar belakang militer sebagai pemegang kekuasaan utama Mesir. Al-Sisi banyak membuat skenario dengan karakteristik sistem demokrasi agar terlihat demokratis.

Penutup

Sejarah perjalanan demokrasi di Mesir terlihat banyak dinodai oleh elite politik yang berkuasa. Transisi politik di Mesir pasca-*Arab Spring* rupanya tidak membawa dampak baik bagi masa depan demokrasi Mesir. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya penanaman demokrasi Mesir pasca-*Arab Spring*. **Pertama**, keengganan elite politik untuk bersatu dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat dan demokratis. Menguatnya hubungan yang tidak harmonis antara kubu liberal-sekuler dengan kelompok Islam yang kemudian memicu terjadinya sentimen polarisasi. Hal ini yang kemudian menjadikan kondisi negara Mesir jauh dari kondisi stabil, sehingga keberlangsungan demokrasi Mesir kerap kali diwarnai persaingan terbuka dan perebutan pengaruh antara kedua kubu. **Kedua**, kemerosotan ekonomi merupakan faktor penentu dalam stabilitas suatu pemerintahan. Pasca-*Arab Spring*, Mesir mengalami kemunduran ekonomi yang cukup tajam, kesenjangan sosial semakin meningkat tajam, sehingga menimbulkan kegaduhan di berbagai daerah. Masyarakat Mesir menuntut kesejahteraan, ditambah dengan harga pangan yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Dengan demikian stabilitas politik negara akan sangat bergantung pada stabilitas ekonomi yang sangat berdampak pada keberlangsungan proses

demokrasi. **Ketiga**, adanya kudeta militer yang berhasil menggulingkan kekuasaan rezim Mursi yang terpilih secara demokratis. Peristiwa ini tentunya telah merusak upaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi bagi negara yang menjalankan sistem yang demokratis. Kudeta dianggap sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi karena berupa tindakan yang ilegal, merampas secara paksa kekuasaan yang terpilih melalui pemilihan umum yang sah.

Selain itu, kalangan militer selalu memiliki kedudukan dan hak istimewa di Mesir. Tatanan ini telah melekat dan terbentuk oleh pemimpin-pemimpin terdahulu Mesir sejak runtuhnya sistem Monarki pada tahun 1952. Militer memiliki wewenang dalam mengembangkan sebagian besar ekonomi Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Militer di Mesir memiliki interelasi yang intern dalam bidang politik dan ekonomi. Oleh karena itu, tatanan ini membuat peran militer tidak dapat dipisahkan dari politik nasional Mesir.

Daftar Pustaka

- Al-Amin, E. (19 Juli 2013). *The Grand Scam: Spinning Egypt's Military Coup Counter*. <http://www.counterpunch.org/2013/07/19/the-grand-scam-spinning-egypts-military-coup/>, diakses pada 18 Juli 2021.
- Alfian, & Syamsudin, N. (1988). *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*. Rajawali.
- Basyar, M. H. (2015). *Pertarungan dalam berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki, dan Israel*. UI Press.
- BBC. (8 Juli 2012). *Egyptian President Mursi reverses parliament dissolution*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18761403>, diakses pada 17 Juli 2021.
- Brown, N. J. (2013). Islam and Politics in the New Egypt. *Carnegie Endowment for International Peace*, 12.
- Cruz, G. (2007). Only a day in Tunisia. *Cruise Travel Magazine*, 32.
- Diamond, L., & Marc, F. P. (2001). *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dunne, M., & Hamzawy, A. (2008). The Ups and Downs of Political Reform in Egypt. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- Economist, T. (30 Maret 2018). *Abdel-Fattah Al-Sisi wins a second term in Egypt.*, <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/03/30/abdel-fattah-al-sisi-wins-a-second-term-in-egypt>, diakses pada 18 Juli 2021.
- Ghafur, M. F. (2014). Agama dan Demokrasi: Munculnya kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Hassan, M. H. (2010). State versus society in Egypt: Consolidating democracy or upgrading autocracy. *African Journal of Political Science and International Relations*, 319-320.
- Hidriyah, S. (2012). Terpilihnya Muhammad Mursi dan Babak baru Demokrasi di Mesir. *Info Singkat Hubungan Internasional*.
- Kahana, E., & Stivi-Kerbis, S. (2014). The Assassination of Anwar Al-Sadat: An Intelligence Failure. *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence*, 183-185.
- Kartini, I. (2015). Kegagalan Empat Negara Arab dan Keberhasilan Indonesia dalam masa Transisi Demokrasi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 53.
- Kirkpatrick, D. D., & Sheikh, M. E. (2012, November 23). *Citing Deadlock, Egypt's Leader Seizes New Power and Plans Mubarak Retrial*. <https://www.nytimes.com/2012/11/23/world/middleeast/egypts-president-mursi-gives-himself-new-powers.html>, diakses pada 17 Juli 2021.
- KomNasKDM. (2014). *Buku Putih: Tragedi kemanusiaan Pasca Kudeta Militer di Mesir*. KomNasKDM.
- Kuncahyono, T. (2013). *Tahrir Square: jantung Revolusi Mesir*. Kompas.
- Dam, S. (2001). *Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan*. P2P-LIPI.
- Machmudi, Y. (2021). *Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam perspektif Indonesia*. Bumi Aksara.
- Mushlih, A., & Hurriyah. (2016). Aktor Politik dan Gagalnya Transisi Demokrasi Mesir tahun 2011-2013. *Politik 2*, 51.

- Nordinger, E. A. (1990). *Militer dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*. Rineka Cipta.
- Pappalarado, J. (2011, Februari 2). *Analysis: Dissecting America and Egypt's Military Relationship*. <http://www.popularmechanics.com/technology/military/news/dissecting-america-and-egyptsmilitary-relationship-5168761>, diakses pada 18 Juli 2021.
- Ramly, L. N., & Irenewaty, R. T. (2015). Kebijakan Politik Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir (2012-2013). *SOCIA Jurnal Ilmu Sosial*, 95.
- Sahide, A. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 4*, 121.
- Sahasrad, H. (2014). Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi. *Konfrontasi Jurnal: Culture, Economy, and social changes*, 47.
- Selim, G. M. (2015). *The International Dimensions of Democratization in Egypt*. Springer.
- Stein, E. (2012). After the Arab Spring: power shift in the Middle East?: revolutionary Egypt: promises and perils. *The London School of Economics and Political Science*, 24.
- Wahyudi, N., Basyar, M., Mashad, D., & Ghafur, M. F. (2020). *Many faces of Political Islam in the Middle East: Arah Baru Gerakan Politik Islam Pasca-Arab Spring*. LIPI Press.
- Wangke, H. (2014). Masyarakat Sipil dan Transisi Demokrasi di Timur Tengah”, Info Singkat Hubungan Internasional. *Info Singkat Hubungan Internasional*, 7.
- Yumitro, G., & Estriani, H. N. (2017). The Quo Vadis of Democratization in Post-Egypt Arab Spring. *CIRR*, 169.
- Yumitro, G., & Estriani, H. N. (2017). The Quo Vadis of Democratization in Post-Egypt Arab Spring. *CIRR*, 181.